

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
  - a. Cadangan pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Lampung Barat yang ada di gudang Bulog Liwa per tanggal 18 Desember 2025 sebanyak 50.619,84 kg
  - b. Pada Bulan Oktober 2025 harga beras premium masih sama, dimana harga beras premium rata-rata bekisar rata rata Rp. 14.600/kg dan harga terendah terjadi di Kecamatan Suoh, BNS dan lumbok seminung dengan harga Rp. 13.000/kg. Harga beras medium rata rata menjadi Rp.13900/kg dan harga terendah terjadi di Kecamatan Suoh , BNS dan Sukau dengan harga Rp. 12.000/kg
  - c. Pada Bulan November harga beras medium masih sama dimana harga beras premium rata-rata bekisar rata rata Rp. 14.600/kg dan harga terendah terjadi di Kecamatan Suoh, BNS dan lumbok seminung dengan harga Rp. 13.000/kg. Harga beras medium rata rata menjadi Rp.13900/kg dan harga terendah terjadi di Kecamatan Suoh , BNS dan Sukau dengan harga Rp. 12.000/kg.
  - d. Kebutuhan Barang pokok penting seperti Beras, Cabai, Minyak Goreng, Bawang, Daging serta sayuran tidak mengalami perubahan harga yang signifikan dan stok di pasaran tetap stabil.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
  - a. Adanya perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi pangan dikarenakan sangat sulit diprediksi.
  - b. Belum memadainya infrastruktur pendukung pertanian.
  - c. Kurangnya jumlah petani dan juga lahan pertanian yang sudah berubah fungsi sehingga rendahnya produktivitas pertanian.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
  1. Memastikan keterjangkauan harga, dengan cara menjaga daya beli masyarakat dengan adanya Bantuan Sosial, Subsidi BLT serta Penguatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dengan memastikan kelancaran distribusi melalui perluasan pemasaran melalui platform digital, mendorong kemitraan dan Kerjasama antar daerah (KAD) surplus.
  2. Untuk menjaga kestabilan harga bapokting khususnya beras Dinas Ketahanan Pangan mengambil beberapa langkah strategis:
    - Monitoring harga bahan pokok yang dilakukan oleh enumerator di 15 Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat dan turun langsung melakukan monitoring ke distributor atau kios pangan mitra BULOG.
    - Melaksanakan monitoring/sidak ke pasar tradisional
    - Melakukan Gerakan Pangan Murah dimana selama tahun 2025 ini sudah dilaksanakan sebanyak 5 titik dan 5 titik akan di adakan kembali mendekati Nataru bulan November 2025.

Membuat Sk Kios Pangan tentang outlet binaan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai mitra Bulog untuk menyalurkan beras SPHP. Dimana terdapat 100 Kios Pangan.

3. Mengikuti Rakor Nasional TPID seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang dipimpin oleh Kemendagri RI dan dilaksanakan pada hari Senin setiap minggunya

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. TPID, BULOG, Satgas Pangan perlu terus berkoordinasi guna memastikan ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi, dan fluktuasi harga.
2. Mengantisipasi disparitas harga komoditas Holtikultura saat periode panen raya dengan terus menjalin kerjasama antar daerah, mengingat Kabupaten Lampung Barat merupakan sentra produksi.
3. Kementerian pertanian diharapkan membuat terobosan terobosan untuk lompatan peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian walaupun lahan terbatas.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Upaya perbaikan dan perawatan jalan sebagai akses distribusi pangan pokok dan peningkatan kualitas sarana serta prasarana lainnya dalam mendukung distribusi pangan keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
2. Mengoptimalkan Tim Koordinasi/ TPID secara konsisten dan bersama-sama memantau perkembangan harga pasar dan harga produsen, agar tidak terjadi margin yang terlalu tinggi antara harga tingkat produsen agen dengan harga pasar.
3. Upaya memperpendek jalur distribusi pangan untuk mengurangi biaya transportasi dengan cara bekerjasama dengan produsen-produsen yang ada.
4. Tetap menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan komunikasi efektif.
5. Melaksanakan 9 upaya Pemda dalam pengendalian inflasi daerah, yaitu:
  - Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
  - Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
  - Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
  - Melaksanakan gerakan pangan murah;
  - Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
  - Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
  - Merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
  - Mendorong kios pangan mitra bulog untuk meningkatkan penyaluran beras SPHP.